

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN	Nomor SOP	61 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Judul SOP	Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi. 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.		1. ASN 2. Pendidikan minimal S1 3. Memahami tata cara pelaksanaan APBD 4. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi dan mekanismenya
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar. 2. SOP penanganan surat masuk.		1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Printer. 5. Aplikasi Sim Gaji Taspen
Peringatan		Pencatatan dan pendataan :
Apabila pelaksanaan SOP Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tidak dijalankan akan berakibat terlambatnya gaji pensiunan ASN bersangkutan.		1. Dicantumkan dalam buku register SKPP 2. Disimpan sebagai data manual dan elektronik

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Analisis Perbendaharaan	Kepala Sub Bidang	Kuasa BUD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan pengajuan penerbitan SKPP. Jika semua dokumen lengkap dan benar akan dicetak konsep SKPP dan diajukan ke Kuasa BUD melalui Kasubid.	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> D1{ } D1 -- Ya --> D2{ } D1 -- Tidak --> Start D2 -- Ya --> End([Selesai]) D2 -- Tidak --> Start </pre>			- Fotocopy SK Pensiun sebanyak 4 lembar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang - Pas Foto berwarna sebanyak 4 lembar - Fotocopy Kartu Keluarga - Surat Keterangan Aktif Kuliah atau Sekolah bagi Anak yang berusia > 21 Tahun dan masih tertunjang	20 menit	Konsep SKPP	Terkait Aplikasi SIM Gaji Taspen
2.	Memeriksa kebenaran konsep SKPP, memparaf dan mengajukan kepada Kuasa BUD jika setuju dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf.				Konsep SKPP	5 menit	SKPP yang sudah diparaf Kasubid	
3.	Memeriksa kebenaran SKPP dan menandatangani jika setuju dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid.				SKPP yang sudah diparaf Kasubid	5 menit	SKPP yang sudah ditandatangani kuasa BUD	
4.	Meregister, menyerahkan SKPP yang sudah ditandatangani Kuasa BUD kepada ASN yang bersangkutan atau Bendahara SKPD serta mengarsipkan lembar SKPP dan dokumen kelengkapan lainnya.				- Buku Register SKPP - SKPP yang sudah ditandatangani kuasa BUD	10 menit	- Tanda terima - Dokumentasi SKPP	